

BAB III

KOPERASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Konsep Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Istilah koperasi berasal dari bahasa asing *coperation, co yang artinya* bersama, *operation* artinya usaha. Jadi koperasi berarti badan atau wadah usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdikan kepada kepentingan perikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.

b. Jenis dan Fungsi Koperasi

Dasar penjenisan koperasi sesuai kebutuhan dari dan untuk maksud efisiensi karena kesamaan aktivitas atau keperluan ekonominya. Koperasi mendasarkan perkembangan pada potensi ekonomi daerah kerjanya. Tidak

dapat dipastikan secara umum dan seragam jenis koperasi yang mana diperlukan bagi setiap bidang.

Penjenisan koperasi seharusnya diadakan berdasarkan kebutuhan dan mengingat tujuan efisiensinya. Ada dua jenis koperasi yang cukup dikenal luas oleh masyarakat, yakni KUD (Koperasi Unit Desa) yaitu tumbuh dan berkembang subur pada masa pemerintah orde baru. KSP (Koperasi Simpan Pinjam) yaitu tumbuh dan berkembang dalam era globalisasi saat ini.

Sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asa kekeluargaan, koperasi memiliki tujuan untuk kepentingan anggotanya antara lain, meningkatkan kesejahteraan, menyediakan kebutuhan, membantu modal, dan mengembangkan usaha.

Dalam praktiknya, usaha koperasi disesuaikan dengan kondisi organisasi dan kepentingan anggotanya. Berdasarkan kondisi dan kepentingan inilah muncul jenis-jenis koperasi :

- a) Koperasi berdasarkan fungsinya :
 1. Koperasi Konsumsi, fungsinya untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya. Yang pasti barang kebutuhan yang dijual di koperasi harus lebih murah dibandingkan tempat lain.
 2. Koperasi Berdasarkan Jasa, fungsinya untuk memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada para anggotanya.
 3. Koperasi Berdasarkan Produksi, untuk membantu penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, membantu memproduksi jenis

barang tertentu serta membantu menjual dan memasarkannya hasil produksi tersebut.

c. Koperasi untuk Komunitas

Globalisasi ekonomi yang dipengaruhi oleh ekonomi neoklasik dan kekuatan kapitalis transnasional telah membawa dampak pada banyak orang. Mereka merasakan bahwa ekonomi *mainstream* tidak lagi memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini terlihat pada angka pengangguran yang tinggi dalam banyak masyarakat yang ditambah dengan “pengangguran tersembunyi”, yakni mereka tidak terhitung dalam statistik resmi.

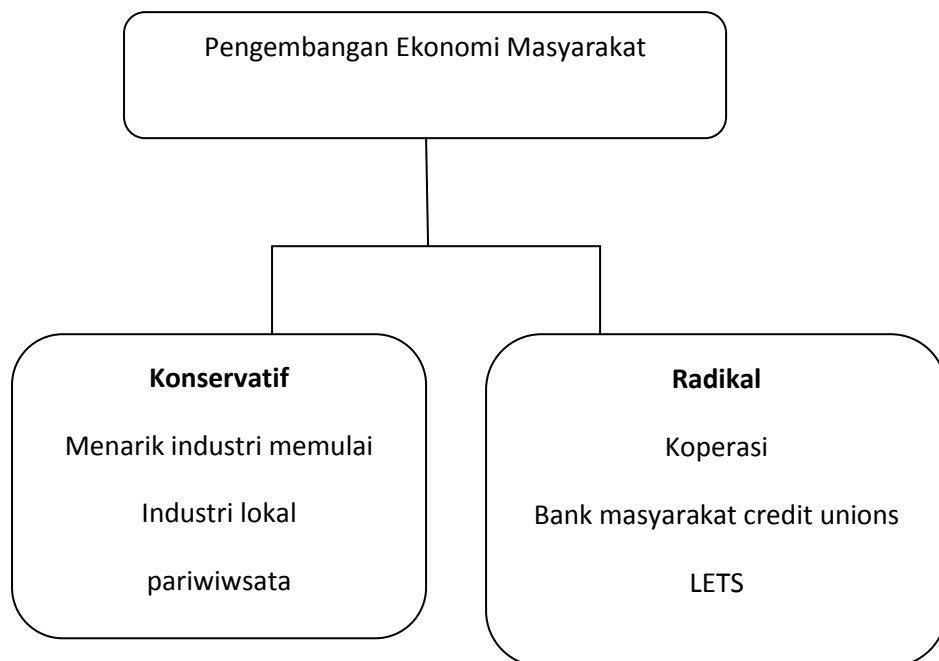
Pengaruh globalisasi tersebut juga terlihat pada jumlah kemiskinan yang semakin meningkat yang tercermin tidak saja dalam statistik garis kemiskinan, tetapi juga dalam angka ketergantungan pada pertolongan darurat seperti bantuan makanan, uang tunai emergensi, lumbung pangan, dsb. Seluruh masyarakat dapat menjadi terpinggirkan secara ekonomi, seperti sebuah industri yang memindahkan logika pasar global dan “perdagangan bebas”, yang tersisa hanyalah pabrik tertutup, hilangnya pekerjaan, masyarakat yang hancur dan keputusasaan modal.

Dalam perspektif pengembangan masyarakat, respon terhadap krisis ekonomi ini ditunjukkan pada pengembangan pendekatan alternatif yang berupaya merelokasikan aktivitas ekonomi dalam masyarakat agar dapat mendatangkan keuntungan bagi masyarakat dan untuk merevitalisasi masyarakat lokal serta untuk memperbaiki kualitas kehidupan dalam organisasi koperasi ini. Krisis ekonomi yang sedang berlangsung telah

memaksa banyak orang dan masyarakat untuk mencari alternatif-alternatif tersebut.

Bagan 3.1

Pengembangan Ekonomi Masyarakat



Koperasi merupakan satu cara yang dapat dicapai dan terbukti efektif di berbagai lokasi seperti yang dilakukan masyarakat. Koperasi juga memiliki potensi untuk memperkuat bukam memperlemah solidaritas masyarakat, dan pengalaman dari banyak koperasi sangat mendukungnya.

Terdapat minat di seluruh dunia yang semakin besar dalam koperasi pekerja di Mondragon, dan terlihat bahwa koperasi menunjukkan alternatif yang sangat baik untuk struktur ekonomi yang lebih konvensional. Meskipun terdapat prinsip-prinsip koperasi yang fundamental, koperasi dapat memiliki bentuk-bentuk yang berbeda tergantung pada kebutuhan lokal dan budaya lokal. Seperti

halnya dengan semua pengembangan masyarakat, pemaksaan rencana yang disusun rinci tentang bagaimana melaksanakannya hampir pasti gagal karena setiap masyarakat perlu memiliki bentuk koperasi tersendiri untuk menyesuaikan dengan situasi yang unik.

B. Pemberdayaan Keluarga Miskin

Lembaga Ekonomi atau koperasi Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dimulai dengan menciptakan atau mengaktifkan kembali bangunan yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2014 secara fisik dan non fisik. Dalam aspek lainnya dimana memulai kembali penataan roda keberlangsungan lembaga dalam sisi manajemen dana administrasi secara baik, rapi dan profesional. Inisiatif ini muncul dari gagasan masyarakat kampung dengan peneliti yang bertujuan untuk memunculkan semangat kembali kegiatan koperasi atau lembaga ekonomi.¹

Table 3.1

Model Pemberdayaan Keluarga Miskin di Wilayah Urban

Aspek Pemberdayaan	Strategi	Bentuk Kegiatan
Peningkatan posisi tawar keluarga miskin	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan pola deversifikasi usaha dan efisien proses produksi dalam kegiatan usaha kecil 	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan ketrampilan alternative bagi keluarga miskin, khususnya perempuan

¹Alan Gilbert & Josef Gugler, 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Tiara Wicana. Hal 20.

	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan dan pengembangan jaringan kelembagaan social-ekonomi local 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelibatan dan intensifikasi tenaga kerja keluarga untuk efisiensi proses produksi
Memperkuat penyangga social-ekonomi keluarga miskin	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan akses pelaku ekonomi rakyat terhadap sumber-sumber permodalan berbunga rendah • Pengembangan asuransi social bagi keluarga miskin 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan efektivitas dan pengguliran paket-paket bantuan modal usaha berbunga rendah bagi keluarga miskin di perkotaan • Pemberdayaan forum pengajian, sinoman, IKAMRA, forum arisan, PWC NU, dan institusi local lain untuk mengurangi kadar kerentanan keluarga miskin.

Dalam hal ini, langkah awal yang semestinya disadari bahwa pemberdayaan masyarakat miskin, sesungguhnya akan selalu berkaitan atau sekurang-kurangnya mencakup dua aspek.²

Pertama, berkaitan dengan upaya peningkatan posisi tawar (*bargaining position*) masyarakat miskin melawan kelakuan dan sifat eksploitatif dari struktur yang membelenggu mereka. Artinya, program pembangunan social dan upaya penanggulangan kemiskinan seyogianya tidak hanya terjebak pada program-program yang sifatnya kariatif dan apalagi yang bersifat *punitive*, melainkan harus lebih mengedepankan program-program yang berorientasi pada proses pemberdayaan, yang intinya bersifat *people centered, participatory, empowering, dan sustainable*. Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan. Pemberdayaan, mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaan. Oleh karena itu, pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan. Dua hal yang menjadi prasyarat bagi upaya pemberdayaan adalah. Pertama, memperkuat kelompok masyarakat (Pokmas) yang sudah ada sehingga mampu meningkatkan posisi *bargaining* penduduk miskin, khusus dalam penentuan harga. Kedua, dalam bentuk pengembangan jaringan dan memperluas akses penduduk miskin terhadap pasar yang lebih luas.

Kedua, berkaitan dengan upaya mengurangi kadar kerentanan dan sekaligus bagaimana memperkuat penyangga social-ekonomi keluarga miskin. Dalam hal ini, salah satu hal yang dapat dikembangkan adalah bagaimana mendorong pengembangan kegiatan produktif alternative keluarga miskin. Selama

² *Ibid*, hal 25

ini, kekurangan pokok yang perlu diperhatikan dari berbagai upaya pengentasan masyarakat miskin yang banyak dipraktekkan adalah bahwa mereka menjadi begitu memusatkan perhatian pada peningkatan kuantitas produksi atau hasil kegiatan produktif masyarakat miskin, sehingga kebutuhan system produksi mendapat tempat yang lebih utama dari pada kebutuhan masyarakat miskin yang lebih substansial. Kedepan, untuk lebih menjamin efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, maka seyogiannya disadari bahwa meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin sesungguhnya tidak selalu harus dengan cara memacu perkembangan dan semata hanya berusaha meningkatkan volume atau jumlah produksi sector usaha kecil tersebut.

Sebagai salah satu alternative dan mungkin juga dapat dilakukan secara bersamaan pola lain yang dapat dilaksanakan untuk mengembangkan usaha kecil adalah dengan cara melakukan efisiensi proses produksi. Selain itu, untuk meningkatkan kadar keberdayaan keluarga miskin dan sekaligus mencegah resiko kemungkinan terjadinya kegagalan total dari usaha keluarga miskin alangkah baiknya jika disaat yang bersamaan tiap-tiap anggota keluarga yang termasuk tenaga kerja produktif didorong untuk mengembangkan kegiatan usaha yang beranekaragam atau satu dengan yang lain saling berbeda. Pengalaman yang sudah-sudah membuktikan bahwa sebuah keluarga yang semata-mata hanya menggantungkan kepada satu mata pencahariaan dimana suami, istri dan anak semua bekerja di sector yang sama umumnya secara social ekonomi lebih rapuh karena jika suatu saat harga komoditi yang mereka produksi anjlok, maka itu berarti semua anggota memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda. Keluarga

yang mengembangkan pola diversifikasi usaha, terbukti dalam kehidupan sehari-hari mereka selalu lebih berdaya dan kenyal terhadap tekanan kebutuhan ekonomi.

Untuk mendukung adanya diversifikasi usaha, salah satunya adalah memanfaatkan lahan sempit di sekitar tempat tinggal mereka untuk usaha produktif. Saat ini pemerintah Kota Surabaya, khususnya Dinas Pertanian, kelautan dan perikanan sedang mengembangkan pertanian perkotaan. Pertanian yang dilakukan berupa menanam tanaman kebutuhan sehari-hari (sawi, Lombok, kangkung dst) dan budidaya ikan (lele, nila, belut) di lahan yang sempit. Potensi ini bisa menjadi salah satu alternative untuk mengupayakan diversifikasi usaha. Keunggulan lain urban-farming ini adalah menciptakan lingkungan menjadi lebih asri dan hijau sehingga lebih ramah untuk anak-anak.

Ketiga, meningkatkan peran lembaga-lembaga local dan kelompok sekunder di masyarakat dalam upaya monitoring dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tidak mengalami penyimpangan atau bisa di tingkat pelaksanaan, maka pra syarat yang dibutuhkan selain harus ada jaminan bahwa proses pelaksanaan program berjalan secara transparan, yang tak kalah penting adalah harus didukung oleh mekanisme dan sistem control yang kuat, khususnya pelibatan dan control dari masyarakat miskin itu sendiri sebagai kelompok sasaran dan control dari lembaga-lembaga local dan kelompok-kelompok sekunder di masyarakat.

Table 3.2**Tujuan Program Penanggulangan Kemiskinan, Kelompok Sasaran Prioritas dan leading Sector**

Tujuan Program	Kelompok Sasaran Prioritas	Leading Sektor Pemerintah Kota Surabaya
Darurat-menyelamatkan	Korban PHK, keluarga Pra-KS dan KS-1, anak putus sekolah, anak kekurangan gizi	Dinsos, Dinkes, Dinas P&K, Dispendik
Pemenuhan kebutuhan Dasar	Keluarga miskin, PNS golongan I dan II, buruh, siswa di jenjang pendidikan dasar, sector informal	Dinsos, Dinkes, Dinas P&K
Memberdayakan	Pengusaha kecil, sector industry kecil, kaum perempuan miskin, sector informal, buruh, PKL	Dinas Koperasidan UKM, Disnaker, Bappemas& KB Surabaya, Dinas Pertanian, kelautan dan perikanan

Keempat, meningkatkan efektifitas pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan yang diimbangi dengan meningkatnya koordinasi yang benar-benar jelas dalam pembagian kerja antar dinas atau lembaga terkait. Secara garis besar, tujuan program penanggulangan kemiskinan seyogiannya dipilih menjadi tiga yaitu, yang bertujuan sebagai program darurat-penyelamatan, program yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk miskin dan

program yang bertujuan untuk memberdayakan atau meningkatkan posisi bargaining penduduk miskin.

Pembagian kerja yang jelas ini dibutuhkan untuk mencegah agar program penanggulangan kemiskinan tidak hanya terkonsentrasi pada upaya-upaya yang sifatnya darurat-penyelamat, yang secara politis populer, tetapi sesungguhnya hanya akan menjadi bom waktu yang dapat mengancam kelangsungan hidup penduduk miskin itu sendiri karena memudarnya mekanisme dan kemampuan mereka untuk menolong dirinya sendiri akibat terlalu banyak disubsidi. Program yang bertujuan memberdayakan penduduk miskin, kendati sulit dan hasilnya baru bisa terlihat dalam jangka yang cukup panjang, tetapi tetap harus menjadi prioritas karena justru dengan keberdayaan itulah keluarga-keluarga miskin akan dapat keluar dari belenggu kemiskinan secara berkelanjutan.

Intervensi untuk meningkatkan pendapatan keluarga adalah program ekonomi yang menitik beratkan pada mikro *finance* dan pelatihan keterampilan (*Vocational training*) yang mengupayakan pengembangan koperasi di masyarakat bukan memberikan bantuan modal tetapi memberikan pengembangan kapasitas bagi pengurus koperasi. Enggan demikian, koperasi yang dibentuk memiliki akuntabilitas dan memiliki jaringan mitra pemodal.

Untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga, berbagai macam pelatihan keterampilan dilakukan, seperti katering, menjahit, produksi makanan kecil, supir, servis motor dan lain-lain. Juga mendorong peningkatan jumlah remaja yang terlatih dan terdidik untuk siap memasuki pasar kerja.